

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA



**LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
DISINFOLAHTAAU
TRIWULAN I
TA 2026**

Jakarta, April 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Disinfohtaau berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang bersih dari korupsi. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Disinfohtaau sebagai unit penyelenggara pelayanan kepada Prajurit dan PNS, maka penting dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai tolak ukur untuk mengetahui integritas dan profesionalisme petugas/penyelenggara layanan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi Zona Integritas 2023. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance yang bersih dan bebas dari korupsi.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada Prajurit dan PNS. Integritas penyelenggara pelayanan akan dinilai diantaranya dapat dilihat mulai dari tidak ada diskriminatif sampai dengan pelaksanaan pelayanan diluar prosedur.

2. Dasar.

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik TNI di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- d. Telgram Asrena Kasau Nomor T/77/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Maksud dari Penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Disinfohtaau ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Disinfohtaau.
- b. Tujuan. Tujuan dari Penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dan bersih dari korupsi.

4. Sasaran.

- a. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
- b. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Manfaat.

Dengan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik, dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelayanan Disinfohtaau yang bersih dan bebas dari korupsi.
- b. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan Disinfohtaau secara periodik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dalam upaya perbaikan pembangunan Zona Integritas Disinfohtaau.
- d. Mengetahui hasil survei Prajurit dan PNS secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pelayanan Disinfohtaau yang bersih dari korupsi.

6. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup pada kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan kepada Prajurit dan PNS sebagai pengguna layanan di lingkungan Disinfohtaau.
- b. Tata Urut. Adapun tata urut dalam penyusunan Laporan Persepsi Anti Korupsi Disinfohtaau, sebagai berikut:
 - 1) Bab I Pendahuluan
 - 2) Bab II Teknis Pelaksanaan
 - 3) Bab III Pengolahan Survei
 - 4) Bab IV Kesimpulan

7. Rencana Kerja.

a. Persiapan.

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan Pelaksana. Survei dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan terhadap Prajurit dan PNS Disinfohtaau.
- 2) Penyiapan Bahan.
 - a) Kuesioner.
 - b) Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 - c) Kelengkapan peralatan.
- 3) Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
 - a) Jumlah Responden.
 - b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- 4) Jadwal penyusunan rencana dan pelaksanaan survei.

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data.

- 1) Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- 2) Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dilanjutkan dengan proses pengisian Google Form melalui link yang telah disiapkan dengan menggunakan smartphone Prajurit dan PNS.
- 3) Pengujian kualitas dan validitas data.
- 4) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c. Metode Survei. Survei dilaksanakan menggunakan e-survei (google form) secara sample kepada Prajurit dan PNS Insub Disinfolahtau.

BAB II TEKNIS PELAKSANAAN

8. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi.

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 04 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023, yang meliputi:

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.
- b. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dan lain-lain.
- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan. Pernyataan disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dan lain-lain) diluar ketentuan.
- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran alas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dan sebagainya).
- e. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

9. Metodologi Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi.

- a. Penyusunan kuisisioner. Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - 1) Bagian I: Identitas responden, meliputi : nama, nomor ponsel, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan.
 - 2) Bagian II: Perilaku anti korupsi, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap perilaku petugas pelayanan yang dinilai.
 - 3) Bagian III: Saran dan masukan pendapatresponden terhadap unit pelayanan.
- b. Penyusunan bentuk jawaban
 - 1) Survei Persepsi Anti Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan SPAK melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Disinfolahtau mulai dari kategori sangat setuju sampai dengan tidak setuju.

Untuk kategori sangat tidak setuju diberi nilai Persepsi 1, tidak setuju diberi nilai Persepsi 2, kurang setuju diberi nilai Persepsi 3, cukup setuju diberi nilai Persepsi 4, setuju diberi nilai Persepsi 5, sangat setuju diberi nilai Persepsi 6.

2) Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan tentang integritas petugas/penyelenggara pelayanan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Disinfolahtau yang bersih dari korupsi.

c. Penetapan responden dan lokasi

1) Jumlah responden.

Responden dipilih secara acak (purposive sampling) di jajaran Insub Disinfolahtau, dengan jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 103 responden.

2) Lokasi dan waktu pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan di Jajaran Insub Disinfolahtau pada jam kerja mulai periode April 2026.

d. Analisa Data

Data yang telah masuk melalui e-Survei (google form), selanjutnya akan diolah dan dianalisa. Pengolahan data akan menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi:

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SPAK	NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Bersih dari Korupsi

e. Evaluasi dan Program.

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Disinfolahtau. Tim internal survei akan memberikan evaluasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai terendah pada komponen perilaku anti korupsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit pelayanan kepada Prajurit dan PNS di lingkungan Disinfolahtau yang bersih dari korupsi.

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

10. Data Responden.

Jumlah Responden yang diambil dalam Survei Persepsi Anti Korupsi sebanyak 103 orang. Rincian data responden, sebagai berikut:

Rincian Data Responden Disinfolahtau

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Gender	LAKI - LAKI	47	94%
		PEREMPUAN	3	6%
2	Usia (Tahun)	21 - 30	13	26%
		31 - 40	6	12%
		41 - 50	21	42%
		51 - 60	10	20%

3	Unit Kerja	AAU	1	2%
		Denmabesau	1	2%
		Depohar 20 Iwj	1	2%
		Depohar 30 Abd	1	2%
		Depohar 50 Smo	1	2%
		Depohar 60 Iwj	1	2%
		Depohar 80 Iwj	1	2%
		Disadaau	1	2%
		Disbtbau	1	2%
		Diskumau	1	2%
		Dispenau	1	2%
		Diswatpersau	1	2%
		Itjenau	1	2%
		Kodau I	8	16%
		Kodau II	5	10%
		Kodau III	5	10%
		Koopsau	1	2%
		Lanud Abd.	1	2%
		Lanud Smh	1	2%
		Lanud Sut	1	2%
		Mako Kodiklatau	1	2%
		Mako Koharmatau	1	2%
		Mako Koopsudnas	1	2%
		Mako Korpasgat	1	2%
		Pusdik Kodiklatau	1	2%
		Puskesau	2	4%
		Pusterau	1	2%
		Seskoau	1	2%
		Setumau	1	2%
		Skomlekau	1	2%
		Slogau	1	2%
		Spersau	1	2%
		Srenau	1	2%
		Sterau	1	2%
4	Pendidikan	S2	11	22%
		S1	27	54%
		DIPLOMA 4	5	10%
		DIPLOMA 3	3	6%
		SMA	4	8%

11. Kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

a. Bagian 1 merupakan Identitas Responden yang akan menjawab pertanyaan dari kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DISINFOLAHTAAU

Section 1 of 3

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) DISINFOLAHTAAU TW I TAHUN 2025

Bapak/Ibu Yang Terhormat,
Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Internal DisinfolahtaaU akan melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka mengukur kualitas pelayanan yang bersih dari korupsi di lingkungan DisinfolahtaaU.

Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas integritas pemberian pelayanan DisinfolahtaaU. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat berperan serta dalam memberikan penilaian masukan dan saran. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi DisinfolahtaaU.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Nama Lengkap *
Short answer text

Pangkat/NRP *
Short answer text

Satuan Kerja *
Short answer text

Nomor HP *
Short answer text

Jenis Kelamin *

1. Laki-laki
2. Perempuan

Usia *

Short answer text

Pekerjaan *

1. TNI
2. POLRI
3. SWASTA
4. WIRUSAHA

Pendidikan *

1. SMP
2. SMA
3. SMK
4. Diploma 1
5. Diploma 2
6. Diploma 3
7. S1
8. S2
9. S3

b. Bagian 2 merupakan pertanyaan dari Kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang berisi pilihan jawaban yang terdiri dari 5 kriteria.

Section 2 of 3

Bagian 2: Kualitas Terhadap Pelayanan

Untuk melihat apakah ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan Disinfolahaatau, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini (pilih salah satu jawaban)

1. Tidak Sesuai
2. Kurang Sesuai
3. Sesuai
4. Sangat Sesuai

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa **tidak ada diskriminasi** pelayanan pada unit layanan Disinfolahaatau. *

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa **tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan** pelayanan pada unit layanan Disinfolahaatau? *

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu **tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas** di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan Disinfolahaatau? *

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa **tidak ada pungutan liar (pungli)** pada unit layanan Disinfohtaau? *

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa **tidak ada percaloan/perantara tidak resmi** pada unit layanan Disinfohtaau? *

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

c. Bagian 3 merupakan saran dan masukan pendapat responden terhadap perilaku anti korupsi.

Section 3 of 3

Saran dan Masukan

Description (optional)

Mohon masukan dan saran dalam rangka perbaikan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Disinfohtaau. *

Long answer text

12. Tingkat Persepsi Anti Korupsi.

Berdasarkan pengolahan data terhadap hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diperoleh hasil pada tabel dibawah ini.

Label Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

NO	UNSUR PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPAK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	PERINGKAT
1.	Tidak Ada Diskriminasi	3,58	89,5	A	Bersih dari Korupsi	4
2.	Tidak Ada Pelayanan di Luar Prosedur/ Kecurangan	3,6	90	A	Bersih dari Korupsi	5
3.	Tidak Ada Imbalan	3,62	90,5	A	Bersih dari Korupsi	1
4.	Tidak Ada Pungutan Liar	3,6	90	A	Bersih dari Korupsi	2
5.	Tidak Ada	3,60	90	A	Bersih dari	3

	Percaloan				Korupsi	
Nilai rata-rata	3,60	90	A		Bersih dari Korupsi	

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa nilai rata-rata interval IPAK 3,60 dan nilai interval konversi IPAK 90 dengan kategori mutu pelayanan Cukup Bersih dari Korupsi (A). Nilai tertinggi pada komponen perilaku anti korupsi yaitu tidak ada pungli (pungutan liar) pada unit layanan, perantara tidak resmi pada unit layanan, tidak ada imbalan sedangkan nilai terendah yaitu tidak ada pelayanan di luar prosedur pelayanan pada unit layanan.

13. Saran dan Masukan Responden.

Untuk memberikan motivasi perilaku anti korupsi dan komitmen integritas kepada petugas/penyelenggara pelayanan Disinfohtaau, maka saran dan masukan dari Prajurit dan PNS sangat diperlukan. Berdasarkan pelaksanaan Survei, Tim intern Zona Integritas Disinfohtaau telah menerima saran dan masukan bahwa perilaku anti korupsi Disinfohtaau secara keseluruhan sudah bersih dari korupsi, namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

14. Evaluasi Hasil Survei.

Berdasarkan hasil SPAK diketahui nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang mendapat apresiasi tinggi yaitu petugas penyelenggara pelayanan Disinfohtaau tidak melakukan pungutan liar atau meminta dan menerima uang, barang dan fasilitas lainnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan Disinfohtaau dalam menegakkan dan membina integritas terutama kepada petugas penyelenggara pelayanan. Sedangkan, aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan Disinfohtaau memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur.

15. Rencana Tindak Lanjut.

Adapun rencana tindak lanjut berdasarkan analisa data yang diperoleh pada Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2026 adalah, sebagai berikut:

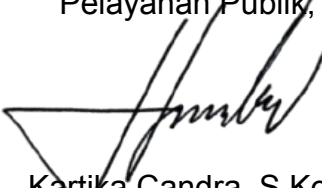
- a. Meningkatkan komitmen dan integritas petugas penyelenggara pelayanan Disinfohtaau guna mempertahankan pelayanan yang bersih dari korupsi.
- b. Untuk menjaga perilaku anti korupsi, sistem manajemen Disinfohtaau terus menerapkan dan meningkatkan pelayanan yang bersih, akuntabel serta transparan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka kemajuan organisasi Disinfohtaau.

BAB IV KESIMPULAN

16. Kesimpulan.

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan Survei Persepsi Anti Korupsi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Disinfohtaau Tahun 2026 dengan nilai interval 3,60 atau nilai konversi 90 dengan kategori Bersih dari Korupsi (A). Hal ini tentunya menjadi motivasi untuk melakukan berbagai inovasi, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pelayanan terhadap Prajurit dan PNS di lingkungan Disinfohtaau yang bersih dari korupsi.

Kapustasisinfo
Selaku
Ketua Bidang Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik,



Kartika Candra, S.Kom
Letkol Lek NRP 534517